MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 247/BUA.2/KP1.1.2/III/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pembayaran Biaya Mutasi Calon Hakim

Jakarta, 25 Maret 2024

Yth. 1. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.

di -
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 31/KMA/SK.DL1/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Satuan Kerja Pengadilan Tempat Magang dan Penempatan Peserta Magang Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu, dengan ini disampaikan kepada satuan kerja yang ditunjuk sebagai satuan kerja magang Calon Hakim agar berperan aktif dalam pengurusan pencairan biaya perjalanan dinas mutasi Calon Hakim, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen kelengkapan biaya mutasi:
   a. Fotokopi buku tabungan yang menunjukan identitas dan nomor rekening pegawai bersangkutan yang masih aktif;
   b. Lembar ke 2 (dua) SPD/Tiba Berangkat yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang (format terlampir);
   c. Bukti transportasi yang mencantumkan harga beserta *boarding pass* (tiket pesawat/kapal laut/bus/travel).
   d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir);
2. Usulan pembayaran biaya mutasi disampaikan oleh Pejabat Pengawas yang menangani bidang Keuangan satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Mengunggah berkas *scan* berwarna pada aplikasi *SIKEP* menu Administrasi, Biaya Mutasi, dan klik menu "**Khusus Biaya Mutasi Cakim**" kemudian pilih tambah **paling lambat tanggal 30 April 2024;**
   b. Wajib menyimpan asli dokumen.

3. Pegawai yang tidak mengunggah kelengkapan dokumen biaya mutasi sebagaimana pada angka 1 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka **biaya mutasi tidak dibayarkan**.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Kepegawaian,



Supatmi

Tembusan:
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi.